



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 67 Tahun 1996

### T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 17 TAHUN 1996 TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1996 Nomor 188.342/1096/03/1996 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pengendalian Pemboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan - Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan - Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831) ;
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1945.K /102/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk Daerah Tingkat III ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan ;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 17 TAHUN 1996 TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

- A. Konsideran Menimbang huruf b tertulis "penerbitan" diubah dan harus dibaca : "penertiban".
- B. Konsideran Mengingat angka 3 menjadi angka 1  
angka 1 menjadi angka 2  
angka 2 menjadi angka 3.
- C. BAB I Ketentuan Umum huruf m tertulis "Kanwil Pertambangan" diubah dan harus dibaca "Kakanwil Pertambangan dan Energi".
  - Diantara kata "Kepala" dan "Wilayah" ditambah kata " Kantor ".
  - BAB I ditambah huruf n baru dan harus dibaca : Kas-Daerah adalah Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- D. BAB II Pasal 2 ayat 1 setelah kata "Daerah" ditambah kata " Tingkat II".
  - Ayat 2 dihapuskan.
  - Ayat 3 lama menjadi ayat 2 baru diubah dan harus dibaca "Izin Pemboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat saran teknis yang mengikat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi".
  - Pasal 4 tertulis "diperuntukkan" diubah dan harus dibaca "diperlukan".
- E. BAB IV Pasal 7 ayat 1 sebelum angka 3 ditambah kata "Pasal".
  - Kata "Pemohon" dihapuskan.
  - Setelah kata "Energi" ditambah kata "Propinsi Lampung".
  - Pasal 8 diubah dan harus dibaca "Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah dimaksud ayat 1 adalah Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah yang telah terdaftar".
  - Pasal 10 masuk BAB IV.
  - Pasal 11 masuk dalam BAB V.
  - Pasal 12 lama menjadi Pasal 13 baru.
  - Pasal 13 lama menjadi pasal 12 baru, dan ditambah huruf e baru dan harus dibaca "Telah habis masa berlakunya".
- F. BAB VII "Retribusi" diubah dan harus dibaca BAB VII - "Pengawasan".
  - Pasal 18 ayat 4 kata "pelunasan", dihapuskan

Pasal 19.....

- Pasal 19 diubah dan harus dibaca :

Pasal 19

Pembagian dan Penggunaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I.
- c. 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional Dinas Pertambangan.

G. BAB VII Pengawasan diubah dan harus dibaca BAB VIII Pengawasan.

- Pasal 21 diubah dan harus dibaca "Pengawas berkewajiban memberikan laporan dan pendapat atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada :

1. Menteri Pertambangan dan Energi RI.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
3. Dinas Pertambangan Tingkat I Lampung.

H. BAB X Pasal 23 ayat 1 setelah kata "umum" ditambah kata "Penyidikan".

I. BAB XII ayat 1 setelah kata "bertentangan" ditambah dengan kata "dengan Peraturan Daerah ini".

- BAB XII ditambah dengan ayat 2 dan harus dibaca :

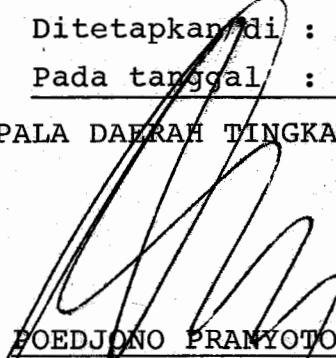
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 3 - 10 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN  
di jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lampung Tengah  
di Metro
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lampung Tengah  
di Metro
4. Kepala Inspektorat Wilayah  
Kabupaten Dati II Lampung Tengah  
di Metro.